



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD DERI BIN SANIMAN, NIK **No KTP** tempat/tanggal lahir, Medan/12 Desember 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Perumahan Amira Blok G-05, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PILU SURAYAH BINTI RUSLI, NIK **No KTP** tempat/tanggal lahir, Dahari Selebar/ 16 Januari 2004, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Amira Blok G-05, Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor **68/Pdt.P/2023/MS.Sus** pada tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Muhammad Deri bin Saniman telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II Pilu Surayah binti Rusli pada tanggal 26 Mei 2022 telah melangsungkan pernikahan di Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II (Rusli) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Jamaluddin, 2. Hasan Basri dengan mahar berupa uang tunai senilai 100.000 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aulia Nasya binti Muhammad Deri;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatatn Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus administrasi kependudukan para Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Kompleksi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompleksi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Deri bin Saniman), dengan Pemohon II (Pilu Surayah binti Rusli), yang dilaksanakan di Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 2022;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapakatuan berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari;

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon oleh Hakim Tunggal yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1175021212820002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 9 September 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175015601040002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 9 September 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 1175010709220007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 6 Januari 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3

B. Bukti Saksi

1. **Kurniawati binti Saniman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon, tempat kediaman di Dusun At-Taubah, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah suami istri yang telah telah menikah secara Islam di Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi, dan menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Jamaluddin dan Hasan Basri dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan para Pemohon, saksi mengetahui hal itu dari cerita para Pemohon dan ibu kandung saksi yang menghidirinya;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sama-sama beragama Islam dan tak pernah murtad;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

2. **Hanifah binti Kasnin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Teladan, Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah suami istri yang telah telah menikah secara Islam di Desa Simpang Gampus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi, dan menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Jamaluddin dan Hasan Basri dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan para Pemohon, saksi mengetahui hal itu dari cerita para Pemohon dan cerita orangtua Pemohon II yang mengabari saksi melalui sambungan telepon;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sama-sama beragama Islam dan tak pernah murtad;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 26 Mei 2022 telah melangsungkan pernikahan di Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Rusli dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Jamaluddin dan Hasan Basri dengan mahar berupa uang tunai senilai 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana penetapan nikah tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kedua bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Subulussalam sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat dipertimbangkan; Maka berdasarkan kedua bukti tersebut apabila dikaitkan dengan perkara yang diajukan para Pemohon berupa permohonan itsbat nikah, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (vide Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, isinya menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan, para Pemohon terikat dalam sebuah ikatan keluarga dan telah dikaruniai 1 orang anak sehingga Hakim menilai P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan; Bahwa meskipun bukti tersebut merupakan salinan dari akta otentik, namun karena tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara yang diajukan para Pemohon yang dalam hal ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 1872 KUHPdata, Hakim menyatakan bukti P.3 *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Kurniawati binti Saniman dan Hanifah binti Kasnin**, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini; Bahwa kedua saksi adalah orang yang tidak memiliki halangan untuk diangkat menjadi saksi, disumpah, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Para Pemohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur didalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun di wilayah Aceh dan lingkungan yang notabenenya masih

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang teguh nilai dan prinsip-prinsip agama serta dikaruniai 1 orang anak tanpa pernah ada sekalipun yang memperlmasalahkan kebersamaan mereka sehingga Hakim Hakim menyatakan sebagaimana tertera juga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang masalah keluarga angka 1 mengenai *Syahadah Istifadah* didalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, dengan tidak memperlmasalahkannya warga sekitar terhadap keadaan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dianggap sebagai gambaran bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama dan dalil permohonan para Pemohon pada *posita* angka 1 dan angka 2 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan dari keterangan para Pemohon serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Mei 2022 telah melaksanakan pernikahan di Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan tata cara agama Islam dan yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Rusli dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Jamaluddin dan Hasan Basri dengan mahar berupa uang tunai senilai 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad yang dapat memutuskan hubungan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aulia Nasya binti Muhammad Deri;

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Hakim berpendapat pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD DERI BIN SANIMAN), dengan Pemohon II (PILU SURAYAH BINTI RUSLI), yang dilaksanakan di Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Aceng Rahmatulloh, S.Sy. dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Aceng Rahmatulloh, S.Sy
Panitera,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP biaya Panggilan	: RP. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/MS.Sus